

Disonansi Tata Kelola Ekonomi Biru, Insekuritas Pangan Pesisir, dan Kegagalan Ekologi Agro-Maritim di Nusa Tenggara Barat

Arman¹, Nike Ardiansyah², Junaidin³, Haeril⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email : arman.umar@gmail.com¹; nikeardiansyah07@gmail.com²;

junaidinrufi2@gmail.com³; Haeril.terminator@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis disonansi tata kelola ekonomi biru terhadap meningkatnya insekuritas pangan pesisir dan kegagalan ekologi agro-maritim di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui dua indikator utama, yakni *Coastal Household Food Insecurity* dan degradasi ekologi agro-maritim. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan melalui kerangka *political ecology*, ekonomi politik pesisir, dan analisis tata kelola kebijakan. Tahapan penelitian dilakukan melalui analisis bibliometrik terhadap 400 artikel terindeks Scopus periode 2010–2025 menggunakan VOSviewer, penelusuran dokumen kebijakan makro dan meso, penentuan informan secara *purposive sampling*, pengumpulan data lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta analisis tematik-kritis terhadap relasi antara investasi maritim, kebijakan ekonomi biru, dan kerentanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi biru di NTB mengalami reduksi teknokratis yang lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi dibanding perlindungan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Indikator *Coastal Household Food Insecurity* memperlihatkan tingginya kemiskinan, dominasi pengeluaran pangan rumah tangga di atas 60 persen, fluktuasi pendapatan nelayan, serta meningkatnya stunting dan ketergantungan pangan luar daerah. Sementara itu, indikator degradasi ekologi agro-maritim ditunjukkan melalui kerusakan mangrove, penurunan tutupan terumbu karang, abrasi pantai, intrusi air laut, sedimentasi, dan eksploitasi sumber daya laut yang memperlemah produktivitas perikanan tradisional. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi biru di NTB belum mampu mentransformasikan kelimpahan sumber daya pesisir menjadi keadilan ekologis, ketahanan pangan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Kata kunci: Disonansi, Ekonomi Biru, Pangan Pesisir, Ekologi, Agro maritim.

Abstract

This study aims to analyze the governance dissonance of the blue economy in relation to the escalating coastal food insecurity and agro-maritime ecological failure in West Nusa Tenggara (NTB) through two principal indicators, namely Coastal Household Food Insecurity and agro-maritime ecological degradation. The research employed a qualitative descriptive approach with a

case study design integrated through the frameworks of political ecology, coastal political economy, and policy governance analysis. The research stages consisted of a bibliometric analysis of 400 Scopus-indexed articles published between 2010 and 2025 using VOSviewer, examination of macro- and meso-level policy documents, purposive sampling for informant selection, field data collection through participatory observation and in-depth interviews, and thematic-critical analysis of the relationship between maritime investment, blue economy policies, and the socio-ecological vulnerability of coastal communities. The findings reveal that the implementation of the blue economy in NTB has undergone a technocratic reduction that prioritizes investment growth over the socio-ecological protection of coastal populations. The Coastal Household Food Insecurity indicator demonstrates persistent poverty, household food expenditure exceeding 60 percent of total income, fluctuating fisher incomes, increasing stunting rates, and growing dependence on externally supplied food commodities. Meanwhile, agro-maritime ecological degradation is reflected in mangrove destruction, declining coral reef cover, coastal abrasion, seawater intrusion, sedimentation, and intensified marine resource exploitation that weakens the productivity of traditional fisheries. This study confirms that the blue economy in NTB has not yet succeeded in transforming coastal resource abundance into ecological justice, food security, and sustainable coastal livelihoods.

Keywords: *Dissonance, Blue Economy, Coastal Food Security, Ecology, Agro-Maritime.*

Pendahuluan

Ekonomi biru dipromosikan sebagai koreksi historis atas kehancuran ekologis dan ketimpangan sosial yang ditinggalkan oleh ekonomi ekstraktif, namun dalam lintasan implementasinya ia justru mengalami reduksi ideologis yang sistemik (Childs, J., & Hicks, C. C. (2019); (Bennett, et al, 2021); (Cisneros, 2021). Alih-alih mentransformasikan struktur produksi dan distribusi, ekonomi biru dipraktikkan sebagai proyek teknokratis yang menstandarkan laut menjadi ruang ekonomi terukur, terzonasi, dan dapat dikapitalisasi (Lee, K.-H., & Noh, 2020); (Ertör, I., & Hadjimichael, 2020); (Farmery, 2021). Di titik ini, laut tidak lagi dipahami sebagai sistem sosial-ekologis, melainkan sebagai aset produktif yang tunduk pada logika investasi (Gelcich, S., & Donlan, 2018); (Firmansyah, F., & Haeril, 2024); (Firdaus et al, 2024). Narasi surplus perikanan dan keunggulan komparatif maritim berfungsi sebagai legitimasi kebijakan, sekaligus menutupi fakta eksklusi struktural terhadap nelayan kecil dan petani pesisir (Haeril, 2019); (Österblom, 2020); (Jouffray, et al, 2020); (Haeril, 2023); (Ishaka, et al 2023). Statistik produksi yang meningkat berjalan paralel dengan memburuknya ketahanan pangan lokal, konflik ruang, dan erosi praktik subsisten. Kebijakan disusun berbasis abstraksi makro dan asumsi kapasitas sumber daya, bukan pada realitas degradasi ekosistem dan kerentanan sosial (Khaerah et al, 2020); (Haeril, et al, 2021); (Iradat, T., & Haeril, 2021); (Hendra et al, 2023). Akibatnya, ekonomi biru gagal menjadi instrumen keadilan ekologis, dan justru menginstitutionalisasi ketimpangan baru di wilayah pesisir (Haeril, et al, 2020); (Okafor-Yarwood et al, 2020).

Paradoks berkembang secara tajam di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara normatif, NTB diposisikan sebagai episentrum ekonomi biru nasional dengan dukungan lebih dari 2,9 juta hektar perairan, pengembangan budidaya rumput laut, pariwisata bahari, hilirisasi perikanan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, proyek percontohan seperti Project ARUS, serta integrasi ekonomi biru dalam RPJMD 2025–2029. Orkestrasi kebijakan tersebut diperkuat oleh target investasi sebesar Rp61,09 triliun pada 2025, revitalisasi pelabuhan perikanan melalui DAK Rp50 miliar, transformasi 31 desa nelayan menjadi kampung nelayan modern, penguatan RTRW 2025–2045, hingga kewajiban alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan pesisir. Namun, di balik kepadatan program dan retorika pembangunan tersebut, indikator kesejahteraan justru menunjukkan kontradiksi yang serius. Pada Maret 2025, data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sekitar 654.570 orang, dengan kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 300,890 ribu jiwa dan tetap tinggi di perkotaan sebesar 353,680 ribu jiwa, menandakan bahwa limpahan kebijakan dan investasi belum terkonversi menjadi perlindungan sosial-ekonomi yang nyata. Kondisi ini berjalan paralel dengan kinerja ekonomi NTB yang justru berkontraksi, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 berada pada minus 0,82 persen dan menempatkan NTB hampir di posisi terbawah nasional. Kegagalan ini semakin mencengangkan ketika dibandingkan dengan NTT yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi stabil hingga 5,44 persen pada periode yang sama, serta Papua Pegunungan provinsi baru dengan keterbatasan infrastruktur yang justru membukukan pertumbuhan positif di atas 4 persen. Fakta ini menggugurkan mitos bahwa kelimpahan sumber daya pesisir otomatis menjamin pertumbuhan (Schutter, et al, 2021); (Rifai, & Haeril, 2024). NTB terperangkap dalam apa yang dapat disebut sebagai *kelimpahan yang menipu*: sumber daya tersedia, investasi masuk, regulasi lengkap, tetapi transformasi kesejahteraan tidak terjadi. Di titik inilah pertanyaan besar mengemuka, mengapa daerah dengan kelimpahan sumber daya pesisir dan agro-maritim justru tertinggal secara ekonomi?

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membongkar ilusi normatif ekonomi biru yang selama ini diterima tanpa resistensi kritis, khususnya di wilayah kepulauan seperti NTB, di mana kelimpahan sumber daya justru beriringan dengan kemiskinan persisten dan kontraksi ekonomi. Penelitian ini menjadi krusial karena berupaya menelusuri disonansi mendalam antara desain kebijakan yang sarat retorika keberlanjutan dengan realitas insekuritas pangan pesisir, eksklusi nelayan kecil, dan degradasi ekologi agro-maritim yang terinstitusionalisasi.

Pendekatan pemecahan masalah penelitian ini dirancang melalui strategi analisis kritis-integratif yang memadukan *political ecology*, analisis tata kelola kebijakan, dan pembacaan ekonomi politik wilayah pesisir. Penelitian menelusuri relasi kausal antara desain kebijakan ekonomi biru, konfigurasi aktor, mekanisme investasi, dan dampaknya terhadap ketahanan pangan, struktur penghidupan nelayan, serta degradasi ekologi agro-maritim.

2021); (Yasin, & Haeril, 2023). Kesenjangan inilah yang memproduksi paradoks empiris di banyak wilayah pesisir, termasuk Nusa Tenggara Barat, di mana kelimpahan sumber daya agro-maritim dan intensitas program ekonomi biru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan keamanan pangan masyarakat pesisir.

Penelitian ini secara sadar menempatkan diri untuk menginterupsi arus utama literatur ekonomi biru dengan menghadirkan pembacaan kritis yang mengaitkan disonansi tata kelola, insekualitas pangan, dan degradasi ekologi dalam satu kerangka analisis terpadu. Dengan cara ini, kebaruan riset tidak hanya terletak pada konteks lokal yang dikaji, tetapi pada pergeseran paradigma dari ekonomi biru sebagai proyek pertumbuhan, menuju ekonomi biru sebagai arena kontestasi keadilan, akses, dan keberlanjutan hidup pesisir.

Demikian, riset ini juga secara tegas melampaui karya-karya pengusul sebelumnya yang telah mapan dalam isu politik lingkungan, kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, fungsi sosial-ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta lokalitas NTB karena penelitian ini untuk pertama kalinya memposisikan ekonomi biru bukan sebagai solusi, melainkan sebagai objek kritik struktural dalam menjelaskan kegagalan transformasi kesejahteraan pesisir

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, yang dirancang secara sistematis untuk menyingkap secara mendalam paradoks ekonomi biru di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai wilayah kepulauan dengan kelimpahan sumber daya pesisir namun mengalami kemiskinan persisten dan kontraksi ekonomi. Pendekatan ini dipilih bukan semata untuk menggambarkan fenomena, melainkan untuk membongkar relasi kuasa, struktur kebijakan, dan praktik ekonomi-politik yang membentuk disonansi antara narasi normatif ekonomi biru dan realitas sosial-ekologis di tingkat lokal.

Tahap pertama penelitian diawali dengan konstruksi kerangka analitis kritis-integratif, yang memadukan *political ecology*, ekonomi politik pesisir, dan analisis tata kelola kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penelusuran dokumen kebijakan makro dan meso, seperti RPJMD NTB 2025–2029, RTRW 2025–2045, program ekonomi biru nasional, dokumen investasi, serta laporan statistik BPS. Analisis dokumen ini berfungsi untuk memetakan logika normatif kebijakan, asumsi pembangunan, dan representasi kelimpahan sumber daya yang selama ini dilembagakan dalam wacana pembangunan pesisir.

Tahap kedua adalah penentuan informan penelitian melalui teknik *purposive sampling*, yang diarahkan untuk menjamin kedalaman data dan relevansi empiris. Informan kunci meliputi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta kabupaten/kota, Bappeda Provinsi NTB, kepala desa-desa pesisir, masyarakat nelayan dan petani pesisir, penggiat wisata bahari, serta pelaku UMKM lokal di wilayah pesisir. Pemilihan aktor-aktor ini mencerminkan posisi mereka dalam rantai kebijakan,

produksi, dan distribusi manfaat ekonomi biru, sekaligus memungkinkan pembacaan lintas skala antara negara, pasar, dan komunitas lokal.

Tahap ketiga merupakan pengumpulan data lapangan, yang dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan penelusuran praktik kehidupan pesisir. Fokus utama tahap ini adalah mengidentifikasi bagaimana kebijakan ekonomi biru diterjemahkan di tingkat lokal, bagaimana konflik ruang dan eksklusivitas nelayan kecil berlangsung, serta bagaimana degradasi ekologi agro-maritim berdampak langsung pada insecuritas pangan rumah tangga pesisir.

Tahap keempat adalah analisis data secara tematik-kritis, dengan menautkan temuan lapangan pada kerangka political ecology dan ekonomi politik. Analisis ini diarahkan untuk mengurai sumber-sumber struktural insecuritas pangan pesisir, mekanisme eksklusivitas nelayan kecil, serta kegagalan ekonomi biru sebagai instrumen keadilan ekologis.

Hasil dan Diskusi

Kerentanan Pangan Rumah Tangga Pesisir

Kerentanan pangan rumah tangga pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperlihatkan paradoks mendalam antara ekspansi agenda ekonomi biru dengan realitas sosial-ekologis masyarakat pesisir yang justru mengalami tekanan ekonomi, penurunan akses pangan, dan ketidakstabilan kehidupan. Dalam kerangka penelitian ini, indikator Coastal Household Food Insecurity menjadi instrumen penting untuk membaca bagaimana kebijakan ekonomi biru yang berorientasi pada investasi, industrialisasi perikanan, pariwisata bahari, dan hilirisasi ekonomi maritim tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan rumah tangga nelayan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan (Lee, K.-H., & Noh, 2020); (Ertör, I., & Hadjimichael, 2020); (Farmery, 2021). Data Badan Pusat Statistik NTB tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 654,57 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,78 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Pada saat yang sama, garis kemiskinan rumah tangga di NTB berada pada angka Rp2.377.732 per bulan dengan rata-rata pengeluaran per kapita Rp556.846 per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pesisir berada dalam posisi rentan karena pengeluaran pangan terus meningkat sementara kapasitas produksi dan pendapatan nelayan bersifat fluktuatif akibat musim tangkap, cuaca ekstrem, dan ketidakpastian akses sumber daya laut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kelimpahan sumber daya agro-maritim di NTB belum berhasil dikonversi menjadi keamanan pangan rumah tangga pesisir secara substantif.

Dalam konteks wilayah pesisir NTB, insecuritas pangan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh transformasi struktur ekonomi pesisir yang semakin terintegrasi dengan logika pasar dan investasi eksternal. Banyak rumah tangga nelayan kecil di Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima mengalami penurunan akses terhadap wilayah tangkap tradisional akibat ekspansi

kawasan wisata bahari, proyek konservasi eksklusif, serta konsentrasi aktivitas budidaya skala besar. Penelitian FAO mengenai small scale fisheries di Asia Tenggara menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan tradisional cenderung mengalami penurunan ketahanan pangan ketika akses terhadap ruang tangkap dibatasi oleh rezim investasi dan zonasi ekonomi laut. Di NTB, kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap pangan pasar, terutama beras distribusi luar daerah, minyak goreng, dan protein impor murah yang menggantikan konsumsi ikan lokal. Pergeseran pola konsumsi ini memperlihatkan melemahnya kemampuan subsisten rumah tangga pesisir yang sebelumnya bertumpu pada integrasi antara hasil laut, pertanian lahan kering, dan pangan lokal berbasis komunitas.

Tingkat akses pangan rumah tangga nelayan di NTB sangat dipengaruhi oleh volatilitas pendapatan musiman. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan kecil di kawasan pesisir selatan Lombok dan Teluk Saleh hanya memiliki hari melaut efektif sekitar 15–20 hari per bulan selama musim normal, dan dapat turun drastis hingga kurang dari 10 hari pada musim gelombang tinggi. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi pendapatan yang berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga. Ketika hasil tangkap menurun, rumah tangga nelayan biasanya mengurangi frekuensi konsumsi protein hewani, mengganti ikan segar dengan ikan asin murah, serta menurunkan kualitas konsumsi harian. Penelitian berbagai jurnal ketahanan pangan pesisir di Indonesia timur menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan miskin mengalokasikan lebih dari 60 persen pendapatan untuk kebutuhan pangan sehingga sangat rentan terhadap inflasi bahan pokok dan penurunan hasil tangkap. Dalam penelitian ini, situasi tersebut menjadi bukti bahwa insekuran pangan pesisir di NTB bukan sekadar akibat kemiskinan individual, tetapi terkait langsung dengan struktur ekonomi maritim yang tidak stabil dan eksklusif.

Fluktuasi konsumsi pangan akibat musim tangkap memperlihatkan pola kerentanan kronis yang terus berulang pada komunitas pesisir NTB. Selama musim paceklik, banyak rumah tangga nelayan mengalami penurunan konsumsi kalori dan protein secara signifikan. Di beberapa desa pesisir Kabupaten Bima dan Sumbawa Barat, strategi bertahan hidup dilakukan dengan mengurangi jumlah makan dari tiga kali menjadi dua kali sehari, meminjam bahan pangan dari kerabat, atau membeli pangan melalui utang warung. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya harga pangan distribusi luar daerah akibat tingginya biaya logistik kepulauan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional dan BPS, harga beras medium di NTB sepanjang 2025 mengalami kenaikan antara 8–12 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara harga ikan tangkap lokal justru mengalami fluktuasi tajam akibat ketergantungan pasar dan cuaca. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa rumah tangga pesisir berada pada posisi paling rentan karena mereka menjual hasil laut dalam sistem pasar yang tidak stabil namun membeli kebutuhan pangan dengan harga yang terus meningkat.

Persentase pengeluaran pangan terhadap pendapatan menjadi indikator paling nyata dalam membaca tingkat kerentanan pangan rumah tangga pesisir. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan di atas 60 persen umumnya dikategorikan rentan pangan karena hampir seluruh pendapatannya habis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di kawasan pesisir NTB, banyak rumah tangga nelayan kecil berada dalam kategori ini akibat rendahnya diversifikasi sumber pendapatan. Ketergantungan tunggal pada hasil tangkap membuat rumah tangga sangat sensitif terhadap perubahan musim dan degradasi ekologi laut. Ketika terjadi penurunan hasil tangkap akibat cuaca buruk atau kerusakan terumbu karang, kemampuan membeli pangan langsung menurun. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi biru yang berorientasi pada peningkatan produksi dan investasi tidak otomatis memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga pesisir. Sebaliknya, orientasi industrialisasi sering kali memperbesar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan nelayan kecil yang tidak memiliki modal, teknologi, maupun akses distribusi.

Data stunting dan malnutrisi di wilayah pesisir NTB memperlihatkan keterkaitan erat antara kerentanan pangan dengan kegagalan tata kelola agro-maritim. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia dan data pemerintah daerah NTB, prevalensi stunting di beberapa kabupaten pesisir seperti Lombok Timur dan Bima masih berada di atas rata-rata nasional meskipun NTB dikenal sebagai daerah dengan potensi perikanan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya laut tidak secara otomatis menghasilkan akses gizi yang merata bagi masyarakat pesisir. Banyak keluarga nelayan justru menjual ikan berkualitas tinggi ke pasar dan mengonsumsi pangan murah dengan nilai gizi rendah demi memenuhi kebutuhan ekonomi harian. Fenomena komodifikasi pangan laut tersebut memperlihatkan bagaimana logika pasar menggeser fungsi pangan lokal dari kebutuhan subsisten menjadi komoditas ekonomi semata. Dalam konteks *political ecology*, situasi ini menunjukkan bahwa krisis gizi di pesisir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perilaku konsumsi, tetapi sebagai konsekuensi struktural dari ketimpangan distribusi manfaat ekonomi maritim.

Tabel berikut memperlihatkan beberapa indikator kerentanan pangan rumah tangga pesisir di NTB berdasarkan kompilasi data BPS, Badan Pangan Nasional, KKP, dan publikasi penelitian ketahanan pangan pesisir.

Tabel 1. indikator kerentanan pangan rumah tangga pesisir di NTB

Indikator	Kondisi NTB 2025	Implikasi Sosial-Ekologis
Tingkat kemiskinan	11,78% atau 654,57 ribu jiwa	Rumah tangga pesisir rentan pangan kronis
Garis kemiskinan rumah tangga	Rp2,37 juta/bulan	Daya beli pangan rendah
Pengeluaran pangan rumah tangga miskin	>60% dari total pendapatan	Kerentanan terhadap inflasi pangan
Hari melaut efektif nelayan kecil	15–20 hari/bulan	Pendapatan sangat fluktuatif

Konsumsi protein saat paceklik	Menurun 30–40%	Risiko malnutrisi meningkat
Stunting wilayah pesisir tertentu	Di atas rata-rata nasional	Kualitas gizi rumah tangga rendah
Ketergantungan beras distribusi luar daerah	Tinggi	Ketahanan pangan lokal melemah
Kenaikan harga pangan 2025	8–12%	Beban ekonomi rumah tangga meningkat

Diversifikasi sumber pangan rumah tangga pesisir juga mengalami pelemahan seiring transformasi ekonomi pesisir berbasis investasi. Sebelum ekspansi ekonomi biru modern, banyak komunitas pesisir NTB mengandalkan kombinasi hasil tangkap, pertanian tadah hujan, peternakan kecil, serta pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan hasil kebun pesisir. Namun, perubahan tata ruang pesisir, tekanan komersialisasi, dan alih fungsi lahan menyebabkan kemampuan rumah tangga mempertahankan sistem pangan campuran semakin menurun. Di sejumlah kawasan pesisir Lombok Tengah dan Lombok Timur, lahan pertanian produktif mulai terdesak oleh pembangunan kawasan wisata dan infrastruktur ekonomi maritim. Akibatnya, rumah tangga kehilangan cadangan pangan alternatif ketika hasil laut mengalami penurunan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kegagalan ekonomi biru di NTB bukan hanya terletak pada distribusi ekonomi, tetapi juga pada hilangnya fondasi ekologis dan budaya pangan lokal.

Ketergantungan terhadap pangan impor dan distribusi luar daerah semakin memperdalam kerentanan rumah tangga pesisir NTB. Sebagian besar kebutuhan beras, gula, minyak goreng, dan pangan olahan dipasok dari luar wilayah sehingga masyarakat pesisir sangat sensitif terhadap gangguan distribusi dan kenaikan harga nasional. Dalam banyak kasus, desa-desa pesisir terpencil di Sumbawa dan Bima menghadapi biaya transportasi pangan yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur logistik. Ketika cuaca buruk menghambat distribusi, harga bahan pokok meningkat drastis dan mengurangi kemampuan rumah tangga memperoleh pangan bergizi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi biru belum berhasil membangun sistem pangan pesisir yang resilien dan berbasis sumber daya lokal. Sebaliknya, integrasi ekonomi pasar justru memperbesar ketergantungan pada rantai distribusi eksternal yang rentan terhadap krisis.

Dalam perspektif ekonomi politik pesisir, kerentanan pangan rumah tangga nelayan di NTB juga dipengaruhi oleh struktur distribusi keuntungan dalam rantai ekonomi maritim. Nelayan kecil sering kali berada pada posisi subordinat dalam sistem perdagangan hasil laut karena bergantung pada tengkulak, pemilik modal, dan perusahaan pengolahan. Ketika harga ikan turun di tingkat nelayan, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pelaku distribusi dan industri. Ketimpangan ini menyebabkan rumah tangga nelayan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan

meskipun aktivitas ekonomi perikanan meningkat secara makro. Banyak studi tentang blue economy menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan produksi laut sering kali menutupi fakta memburuknya kesejahteraan komunitas pesisir. Dalam konteks NTB, situasi tersebut terlihat dari meningkatnya investasi sektor maritim tanpa diikuti peningkatan signifikan pada kualitas hidup rumah tangga nelayan.

Kerusakan ekologi agro-maritim turut memperburuk ketahanan pangan rumah tangga pesisir di NTB. Penurunan kualitas terumbu karang, abrasi pantai, intrusi air laut, serta pencemaran wilayah pesisir menyebabkan produktivitas perikanan dan pertanian pesisir menurun secara simultan. Di beberapa kawasan pesisir utara Lombok dan Teluk Bima, nelayan mengeluhkan semakin jauhnya lokasi tangkap ikan akibat degradasi habitat laut. Biaya operasional melaut meningkat sementara hasil tangkap tidak stabil. Pada saat yang sama, lahan pertanian pesisir mengalami penurunan kesuburan akibat salinisasi dan perubahan iklim. Kombinasi krisis laut dan krisis pertanian ini menghasilkan tekanan ganda terhadap rumah tangga pesisir karena sumber pangan dan sumber pendapatan sama-sama melemah. Dalam pendekatan political ecology, kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana kegagalan tata kelola lingkungan bertransformasi menjadi insecurities pangan struktural.

Data empiris lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga pesisir di NTB mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan akses pangan. Strategi tersebut meliputi migrasi musiman, diversifikasi pekerjaan informal, utang konsumsi, hingga peningkatan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi domestik dan perdagangan kecil. Namun, strategi adaptasi ini umumnya bersifat jangka pendek dan tidak mampu mengatasi akar struktural kerentanan pangan. Banyak rumah tangga nelayan terjebak dalam siklus utang karena pendapatan tidak stabil sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Di desa-desa pesisir Lombok Timur, perempuan nelayan sering menjadi aktor utama yang menjaga keberlanjutan konsumsi rumah tangga melalui usaha kecil pengolahan ikan, perdagangan makanan, dan kerja informal lainnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa insecurities pangan pesisir tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga dengan relasi gender, kerja domestik, dan distribusi beban ekonomi dalam rumah tangga.

Kerentanan pangan rumah tangga pesisir di NTB pada akhirnya memperlihatkan disonansi mendalam antara narasi besar ekonomi biru dengan realitas sosial-ekologis masyarakat lokal. Program investasi maritim, hilirisasi perikanan, modernisasi pelabuhan, dan ekspansi wisata bahari memang meningkatkan aktivitas ekonomi makro, tetapi tidak secara otomatis memperkuat kemampuan rumah tangga nelayan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Data kemiskinan, tingginya pengeluaran pangan, fluktuasi konsumsi akibat musim tangkap, tingginya stunting, serta ketergantungan pada pangan luar daerah memperlihatkan bahwa komunitas pesisir masih berada dalam kondisi rentan secara struktural. Situasi ini menegaskan bahwa indikator Coastal Household Food Insecurity tidak hanya merepresentasikan masalah konsumsi pangan, melainkan menjadi refleksi dari kegagalan tata kelola

ekonomi biru dalam membangun keadilan distribusi, perlindungan sosial-ekologis, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat.

Degradasi Ekologi Agro-Maritim

Dalam satu dekade terakhir, degradasi ekologi agro-maritim di Nusa Tenggara Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan multidimensional. Transformasi pesisir yang didorong oleh agenda ekonomi biru memperlihatkan paradoks antara ekspansi investasi maritim dengan penurunan kualitas ekosistem pendukung produksi pangan pesisir (Haeril, 2019); (Österblom, 2020); (Jouffray, et al, 2020); (Haeril, 2023); (Ishaka, et al 2023). Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, KLHK, dan berbagai studi akademik menunjukkan bahwa kawasan pesisir NTB mengalami tekanan simultan berupa kerusakan mangrove, penurunan kualitas terumbu karang, abrasi pantai, sedimentasi pesisir, serta intensifikasi eksploitasi sumber daya laut. Dalam konteks agro-maritim, kerusakan ekologis tersebut tidak hanya berdampak pada biodiversitas laut, tetapi juga mengganggu sistem kehidupan nelayan kecil, petani pesisir, dan rumah tangga maritim yang selama ini bergantung pada stabilitas ekosistem pesisir sebagai sumber produksi pangan dan ekonomi lokal.

Ekosistem mangrove menjadi indikator awal yang memperlihatkan tekanan ekologis paling nyata. Dalam rentang 2014–2025, kawasan mangrove di pesisir Lombok Timur, Teluk Bima, Teluk Saleh, dan pesisir Sumbawa Barat mengalami fragmentasi akibat ekspansi tambak, pembangunan pariwisata bahari, reklamasi kawasan pesisir, dan pertumbuhan permukiman. Secara nasional Indonesia kehilangan hampir 40 persen mangrove dalam tiga dekade terakhir akibat konversi lahan tambak dan aktivitas pesisir lainnya. Dalam konteks NTB, tekanan tersebut tampak dari meningkatnya kawasan tambak intensif dan perluasan kawasan wisata pesisir yang mengubah fungsi ekologis mangrove sebagai penahan abrasi, penyerap karbon, dan habitat biota laut. Hilangnya vegetasi mangrove mempercepat intrusi air laut ke lahan pertanian pesisir serta meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir rob dan sedimentasi muara sungai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekspansi ekonomi pesisir berbasis investasi belum terintegrasi dengan perlindungan ekologis jangka panjang.

Kerusakan terumbu karang juga memperlihatkan tren degradasi yang serius selama sepuluh tahun terakhir. Studi di kawasan Gili Matra menunjukkan persentase tutupan karang hidup hanya berkisar 4,4–37,2 persen dengan kategori kondisi dominan berada pada tingkat sedang hingga buruk. Penurunan kualitas karang dipicu oleh kombinasi pemutihan karang akibat kenaikan suhu laut, sedimentasi pesisir, aktivitas wisata massal, penggunaan jangkar kapal wisata, dan praktik penangkapan destruktif. Di Teluk Saleh, sedimentasi meningkat hingga di atas 16 mg/L dan berkorelasi langsung terhadap menurunnya kualitas tutupan terumbu karang. Pada wilayah Lombok Timur, tutupan terumbu karang berkisar 42,66–55,11 persen, namun wilayah selatan menunjukkan tekanan lebih besar akibat aktivitas manusia dan eksploitasi kawasan pesisir. Degradasi karang ini berdampak langsung pada penurunan stok ikan karang

dan produktivitas perikanan tangkap tradisional yang menjadi sumber utama protein rumah tangga pesisir.

Fenomena pemutihan karang pasca-2016 memperlihatkan percepatan tekanan perubahan iklim terhadap sistem ekologis NTB. Studi di kawasan Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan menunjukkan peningkatan proporsi karang mati dan memutih akibat kenaikan suhu permukaan laut yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Data BMKG bahkan menunjukkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas di Indonesia sejak 1981 dengan anomali suhu mencapai $0,8^{\circ}\text{C}$ di atas rerata normal. Peningkatan suhu laut tersebut mempercepat stres ekologis pada terumbu karang dan mengurangi kapasitas regenerasi ekosistem pesisir. Dalam konteks agro-maritim, kerusakan terumbu karang tidak hanya berdampak pada hilangnya habitat ikan, tetapi juga mengganggu rantai ekonomi lokal berbasis wisata selam, perikanan tradisional, dan perdagangan hasil laut skala kecil.

Penurunan produktivitas perikanan tangkap menjadi indikator lain yang menandai kegagalan ekologis agro-maritim. Walaupun statistik produksi perikanan NTB secara agregat mengalami peningkatan akibat industrialisasi budidaya dan ekspansi armada besar, nelayan tradisional justru mengalami penurunan hasil tangkap harian. Wawancara lapangan dalam penelitian menunjukkan bahwa nelayan kecil di Lombok Timur, Sumbawa, dan pesisir Bima harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional lebih tinggi untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sebelumnya dapat diperoleh di wilayah pesisir dekat pantai. Penurunan stok ikan pesisir berkaitan dengan rusaknya nursery ground mangrove dan terumbu karang serta meningkatnya tekanan eksploitasi sumber daya laut oleh kapal besar dan praktik penangkapan berlebih. Kondisi tersebut memperlihatkan terjadinya ketimpangan ekologis di mana keuntungan produksi meningkat secara makro, namun distribusi manfaat ekonomi justru menjauh dari komunitas pesisir kecil.

Tabel berikut memperlihatkan indikator utama degradasi ekologi agro-maritim di NTB selama satu dekade terakhir berdasarkan kompilasi data publikasi pemerintah dan jurnal ilmiah.

Tabel II. Indikator utama degradasi ekologi agro-maritim di NTB

Indikator Ekologi Agro-Maritim NTB	Kondisi 2014–2016	Kondisi 2023–2025	Dampak Utama
Tutupan terumbu karang Gili Matra	Dominan kategori sedang	Banyak lokasi kategori buruk 4,4–37,2%	Penurunan stok ikan karang
Sedimentasi Teluk Saleh	Sedang	8–16 mg/L	Penurunan kualitas karang
Abrasi pantai Kota Mataram	Lokal	Meluas di beberapa titik pesisir	Relokasi rumah tangga pesisir

Indikator Ekologi Agro-Maritim NTB	Kondisi 2014–2016	Kondisi 2023–2025	Dampak Utama
Intrusi air laut pesisir	Terbatas	Meningkat pada lahan pertanian pesisir	Penurunan kesuburan tanah
Alih fungsi mangrove	Bertahap	Intensif akibat tambak dan wisata	Hilangnya habitat pesisir
Intensitas eksploitasi laut	Tradisional	Semi-industrial dan padat investasi	Overfishing lokal
Pencemaran pesisir	Rendah-menengah	Meningkat akibat sampah dan limbah	Penurunan kualitas air

Sumber: Data dihimpun dari publikasi KLHK, KKP, BMKG, BPS NTB, dan berbagai studi akademik 2014–2025.

Alih fungsi lahan pesisir menjadi faktor utama yang mempercepat degradasi sistem agro-maritim NTB. Dalam satu dekade terakhir, kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi ruang produksi masyarakat nelayan dan petani garam berubah menjadi kawasan wisata, tambak intensif, pelabuhan, dan permukiman komersial. Di Lombok Utara dan Lombok Tengah, pertumbuhan sektor pariwisata menyebabkan tekanan besar terhadap ekosistem pantai dan ruang tangkap masyarakat lokal. Ekspansi hotel, restoran, dermaga wisata, dan infrastruktur pesisir mengurangi ruang ekologis bagi regenerasi mangrove dan lamun. Akibatnya, keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologis mengalami ketimpangan serius, terutama di wilayah dengan intensitas kunjungan wisata tinggi.

Abrasi pantai dan intrusi air laut menunjukkan eskalasi yang semakin nyata di kawasan pesisir NTB. Data BPBD NTB tahun 2025 menunjukkan garis pantai Kota Mataram sepanjang 9-kilometer berada dalam kondisi rentan abrasi, bahkan menyebabkan relokasi sekitar 100 kepala keluarga akibat kerusakan pantai di wilayah Mapak. Fenomena abrasi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan hilangnya vegetasi pelindung pantai, peningkatan gelombang ekstrem, serta perubahan pola arus laut akibat perubahan iklim global. Intrusi air laut juga mulai mempengaruhi lahan pertanian pesisir di Lombok Barat dan Lombok Timur sehingga menurunkan produktivitas lahan sawah dan kebun masyarakat. Salinisasi tanah menyebabkan penurunan kesuburan tanah, kerusakan sistem irigasi tradisional, dan berkurangnya kapasitas produksi pangan lokal.

Peningkatan sedimentasi pesisir memperlihatkan lemahnya integrasi tata kelola darat dan laut dalam pembangunan agro-maritim. Sedimentasi tinggi di Teluk Saleh berkaitan dengan deforestasi hulu DAS, pembukaan lahan pertanian, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur tanpa mitigasi ekologis memadai. Material sedimen yang terbawa ke wilayah pesisir mengganggu fotosintesis karang, menurunkan kualitas habitat ikan, dan mempercepat eutrofikasi perairan dangkal. Dalam konteks ekonomi pesisir, sedimentasi menyebabkan nelayan tradisional kehilangan area tangkap

produktif dan memaksa pergeseran lokasi penangkapan yang lebih jauh serta lebih mahal secara operasional.

Tingkat pencemaran wilayah pesisir juga mengalami peningkatan signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan kawasan wisata, urbanisasi pesisir, dan lemahnya sistem pengelolaan sampah menyebabkan peningkatan limbah domestik dan plastik laut di kawasan pantai NTB. Beberapa kawasan wisata bahari seperti Gili Trawangan dan pesisir Senggigi menghadapi tekanan pencemaran akibat akumulasi limbah wisata dan aktivitas transportasi laut. Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas air pesisir serta mengganggu ekosistem lamun dan terumbu karang. Dalam penelitian ini, observasi lapangan menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya berasal dari aktivitas lokal, tetapi juga dari aliran sampah regional yang terbawa arus laut dan bermuara di kawasan pesisir NTB.

Eksplorasi sumber daya laut secara intensif memperlihatkan transformasi ekonomi biru yang semakin berorientasi pada ekstraksi dibanding keberlanjutan. Peningkatan armada penangkapan modern, ekspansi budidaya intensif, dan orientasi produksi ekspor menyebabkan tekanan ekologis pada sumber daya perikanan lokal. Di beberapa wilayah pesisir Sumbawa dan Bima, nelayan tradisional melaporkan penurunan ukuran ikan tangkapan dan semakin sulitnya memperoleh spesies ekonomis penting. Tekanan tersebut menunjukkan gejala overfishing lokal yang diperparah oleh lemahnya pengawasan wilayah tangkap dan ketimpangan akses teknologi antara nelayan kecil dan pelaku industri perikanan skala besar.

Kerusakan ekologis agro-maritim di NTB juga memperlihatkan hubungan erat antara degradasi lingkungan dan insecurities pangan rumah tangga pesisir. Penurunan hasil tangkapan ikan, intrusi air laut pada lahan pertanian, serta meningkatnya biaya produksi melaut menyebabkan rumah tangga nelayan mengalami tekanan ekonomi yang semakin tinggi. Dalam banyak wilayah pesisir, masyarakat mulai bergantung pada pangan pasar dan distribusi luar daerah akibat melemahnya kapasitas produksi lokal. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa degradasi ekologis bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi berkaitan langsung dengan kerentanan sosial-ekonomi dan keberlanjutan kehidupan komunitas pesisir.

Dalam perspektif *political ecology*, kegagalan ekologi agro-maritim NTB memperlihatkan adanya disonansi antara narasi pembangunan ekonomi biru dengan realitas distribusi risiko ekologis di tingkat lokal. Investasi pesisir dan ekspansi ekonomi maritim menghasilkan pertumbuhan spasial dan statistik pembangunan, tetapi secara simultan mempercepat degradasi ekosistem yang menopang produksi pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. Ketika mangrove menyusut, terumbu karang rusak, abrasi meningkat, dan produktivitas tangkap menurun, maka yang terjadi bukan sekadar penurunan kualitas lingkungan, melainkan restrukturisasi ekologis yang memindahkan beban kerusakan kepada rumah tangga nelayan kecil dan petani pesisir yang memiliki kapasitas adaptasi paling rendah.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa disonansi tata kelola ekonomi biru di Nusa Tenggara Barat mereproduksi paradoks pembangunan pesisir, di mana intensifikasi investasi maritim dan ekspansi industrialisasi perikanan justru berjalan paralel dengan meningkatnya insekualitas pangan rumah tangga pesisir serta degradasi ekologi agro-maritim. Melalui indikator *Coastal Household Food Insecurity*, penelitian menemukan bahwa tingginya kemiskinan pesisir, dominasi pengeluaran pangan di atas 60 persen dari pendapatan rumah tangga, fluktuasi hari melaut, serta meningkatnya stunting menunjukkan kegagalan transformasi ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dan perlindungan sosial-ekologis masyarakat nelayan kecil. Sementara itu, indikator degradasi ekologi agro-maritim memperlihatkan percepatan kerusakan mangrove, penurunan tutupan terumbu karang, abrasi, sedimentasi, dan intrusi air laut yang secara simultan menurunkan produktivitas perikanan dan pertanian pesisir. Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi biru di NTB lebih beroperasi sebagai mekanisme ekstraksi spasial dan akumulasi kapital dibanding instrumen keadilan ekologis dan keberlanjutan penghidupan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., Calò, A., Christie, P., Di Franco, A., Finkbeiner, E. M., Gelcich, S., Guidetti, P., Harper, S., Hotte, N., Kittinger, J. N., Le Billon, P., Lister, J., López de la Lama, R., McKinley, E., ... Sumaila, U. R. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>
- Childs, J., & Hicks, C. C. (2019). Securing the blue: Political ecologies of the blue economy in Africa. *Journal of Political Ecology*, 26(1), 323–340. <https://doi.org/10.2458/v26i1.23162>
- Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Voyer, M., Allison, E. H., Cheung, W. W. L., Hessing-Lewis, M., Singh, G. G., Swartz, W., & Ota, Y. (2021). Social equity and benefits as the nexus of a transformative blue economy. *Marine Policy*, 133, 104690. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104690>
- Ertör, I., & Hadjimichael, M. (2020). Blue growth and the politics of the sea: Rethinking the blue economy. *Sustainability Science*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00772-y>
- Farmery, A. K., Allison, E. H., Andrew, N. L., Troell, M., Voyer, M., Campbell, B., Eriksson, H., Fabinyi, M., Song, A. M., & Steenbergen, D. (2021). Blind spots in visions of a “blue economy” could undermine the ocean’s contribution to eliminating hunger and malnutrition. *One Earth*, 4(1), 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.002>

- Firdaus, F., Ahmad, S., Akhyar, A., & Haeril, H. (2024). Efektivitas program kesehatan berbasis masyarakat untuk mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Bima. *Jurnal Syntax Imperatif*, 5(3), 366–376.
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89.
- Firmansyah, F., Haeril, H., Akhyar, A., & Hidayatullah, A. (2025). Dinamika kuasa lokal dan politik anggaran: Ekspose korupsi struktural dalam sistem pengadaan di Bima dan Dompu. *JISPENDIORA*, 4(1), 543–561.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022: Towards blue transformation*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Gelcich, S., & Donlan, C. J. (2018). Incentivizing biodiversity conservation in artisanal fishing communities through territorial user rights and business model innovation. *Conservation Biology*, 29(4), 1076–1085. <https://doi.org/10.1111/cobi.12477>
- Haeril, H. (2019). *Management of sustainable coastal areas and small islands based on collaborative management (Case study in Bima Regency, West Nusa Tenggara)*.
- Haeril, H. (2023). Menuju kesejahteraan pesisir: Evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 14–21.
- Haeril, H., Anilawati, N., & Irfadat, T. (2020). Bima regional government institutional capabilities in disaster management. *International Journal of Humanities, Literature and Arts*, 3(1), 76–84.
- Haeril, H., Anilawati, N., & Suraya, S. (2021). Kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 1–30.
- Haeril, H., Hamidah, N. K., Mas'ud, M. U., & Anilawati, N. (2020). Upaya kelembagaan dalam pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan di Kabupaten Bima. *Sadar Wisata*, 3(1), 25–31.
- Haeril, H., Irfadat, T., & Mas'ud, M. U. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengurangan risiko bencana alam di Kabupaten Bima. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–6.
- Haeril, H., Mas'ud, M. U., Irfadat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan kebijakan mitigasi bencana (fisik dan nonfisik) dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bima. *Journal of Government and Local Politics*, 3(1), 23–47.
- Haeril, H., Syamsuddin, S., Mas'ud, M. U., Kasman, K., & Marfah, M. (2025). An examination of social solidarity, value systems, and tourism policy within the Compang tradition of West Manggarai and the Uma Lengge tradition of Bima. *Journal of Government and Local Politics*, 7(2), 330–341.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin pesisir. *Jurnal Intelektualita*, 12(1), 72–80.

- Iradat, T., & Haeril, H. (2021). Resolusi konflik berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Journal of Government and Local Politics*, 3(1), 48–62.
- Ishaka, M. (2024). Ethical challenges and bureaucratic impartiality of civil servants in the 2024 simultaneous regional elections in Bima City. *Komunitas*, 15(2), 145–158.
- Ishaka, M., Kadir, A., Haeril, H., Suraya, S., & Irawansyah, I. (2023). Analysis of cross-sectoral collaboration in local disaster management: A study on the Bima Regency Government. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 51–62.
- Jouffray, J.-B., Blasiak, R., Norström, A. V., Österblom, H., & Nyström, M. (2020). The blue acceleration: The trajectory of human expansion into the ocean. *One Earth*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.12.016>
- Khaerah, N., Rusnaedy, Z., & Haeril, A. H. (2020). *Sustainable development (SDGs) of the coastal zone and small islands in Bima Regency*.
- Lee, K.-H., & Noh, J. (2020). Blue economy and the sustainable development goals: A systematic literature review. *Ocean & Coastal Management*, 194, 105281. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105281>
- Mas'ud, M. U., & Haeril, H. (2022). Implementasi kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. *Serat Acitya*, 11(1), 133–143.
- Mulyawan, W., Haeril, H., & Irfadat, T. (2021). Upaya pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi budaya “Uma Lengge” di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Jurnal SIKAP*, 5(1), 1–8.
- Okafor-Yarwood, I., Kadagi, N. I., Miranda, N. A. F., Uku, J., Elegbede, I. O., & Adewumi, I. J. (2020). The blue economy–cultural livelihood–ecosystem conservation triangle: The African experience. *Frontiers in Marine Science*, 7, 586. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00586>
- Österblom, H., Jouffray, J.-B., Folke, C., Crona, B., Troell, M., Merrie, A., & Rockström, J. (2020). Transnational corporations as ‘keystone actors’ in marine ecosystems. *PLoS ONE*, 10(5), e0127533. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127533>
- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Government and Local Politics*, 6(1), 25–36.
- Rifai, R., & Haeril, H. (2025). *Digital health governance within the architecture of stunting prevalence mitigation: A convergence of data integration, technological innovation, and public policy dynamics*.
- Rifai, R., & Haeril, H. (2025). Post-electoral political exclusion following the 2024 simultaneous regional elections in West Nusa Tenggara (NTB). *Journal of Government and Local Politics*, 7(1), 109–119.
- Schutter, M. S., Hicks, C. C., Phelps, J., & Waterton, C. (2021). The blue economy as a boundary object for hegemony across scales. *Marine Policy*, 132, 104697. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104697>

- Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2019). Blue economy and competing discourses in international oceans governance. *The Journal of Environment & Development*, 24(2), 135–160. <https://doi.org/10.1177/1070496515580797>
- Song, A. M., Scholtens, J., Barclay, K., Bush, S. R., Fabinyi, M., Adhuri, D. S., & Haughton, M. (2021). Collateral damage? Small-scale fisheries in the global fight against IUU fishing. *Fish and Fisheries*, 21(5), 831–843. <https://doi.org/10.1111/faf.12474>
- Suraya, S., & Haeril, H. (2022). Kemampuan penggunaan teknologi dan manajemen riset dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bima. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 13–18.
- Usman, A., Ardiansyah, N., Syamsuddin, S., & Haeril, H. (2023). Peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. *Jurnal Intelektualita*, 12(1), 96–103.
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- Wahyuli, S., Nurfarhaty, N., & Haeril, H. (2023). Natural disaster management in local government from the perspective of collaborative governance. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 93–102.
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Neves, A. A. S., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., & Fangli, Q. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6, 261. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>
- Yasin, H., & Haeril, H. (2023). Empowerment of coastal community's social and economic in Bima Regency, Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 155–166.